

# RENSTRA BPBD 2025-2029

---

RENCANA KERJA

BPBD Nunukan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat serta HidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 telah disusun dengan merujuk kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 serta memedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan memuat misi, tujuan, startegi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, target, indikator dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan. Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2025-2029 yang merupakan penetapan kinerja kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan sebagai tolak ukur penilaian dan pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Kepala Daerah secara tahunan sampai pada masa berakhirnya jabatan.

Kami ucapkan terima kasih kepada seuruh komponen Tim Penyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan untuk mewujudkan Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata sesuai tujuan RPJMD pada Misi ke 4 (empat).

TIM Penyusun

Renstra BPBD 2025-2029

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>5</b>
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	5
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	27
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	36
3.1.1 Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	36
3.1.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2025-2029.....	37
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029.....	38
3.2.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	38
3.2.2 Matriks Penahapan Renstra PD .....	39
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN</b>	
<b>BIDANG URUSAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD.....	43
4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator,	

Target dan Pagu Indikatif .....	43
4.1.2 Uraian Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	56
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	58
4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	58
4.2.2 Perangkat Daerah Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 .....	13
Tabel 2.2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021-2024 .....	17
Tabel 2.3 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2020-2024.....	23
Tabel 2.4 : Kelompok Sasaran Layanan Kebencanaan.....	27
Tabel 2.5 : Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	28
Tabel 2.6 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD.....	32
Tabel 2.7 : Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .....	33
Tabel 2.8 : Isu Strategis.....	34
Tabel 3.1 : Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	37
Tabel 3.2 : Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan .....	38
Tabel 3.3 : Penahapan Renstra PD .....	40
Tabel 4.1 : Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan .....	44
Tabel 4.2 : Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD.....	45
Tabel 4.3 : Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	50
Tabel 4.4 : Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	56
Tabel 4.5 : Indikator Kinerja Utama PD .....	59
Tabel 4.6 : Indikator Kinerja Kunci.....	59

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi .....	11
Gambar 2.2 : Diagram Jumlah ASN .....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai satu kesatuan perencanaan daerah yang utuh, Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan irisan sebagai bagian dari salah satu tahapan untuk mewujudkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah (PD), dalam hal ini Renstra BPBD Kabupaten Nunukan.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Renstra PD sesuai ketentuan, perlunya menempatkan Renstra Provinsi sebagai salah satu pedoman dalam penyusunannya. Pada penyusunan Renstra PD dalam hal ini BPBD Kabupaten Nunukan juga tidak terlepas dari Renstra BNPB sebagai pedoman dan acuan yang berkaitan dengan urusan kebencanaan. Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 124 bahwa Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD. Renja PD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BPBD Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebencanaan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan mengamanahkan bahwa BPBD Kabupaten Nunukan bertanggungjawab membantu Bupati Nunukan menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dalam penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, BPBD Kabupaten Nunukan fokus pada bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa urusan kebencanaan dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

BPBD Kabupaten Nunukan dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan teknis yang berkaitan dengan kebencanaan harus mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah. BPBD Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebencanaan tidak lagi merumuskan visi dan misi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa SKPD tidak lagi berkewajiban merumuskan visi misi SKPD. Visi misi Kepala daerah, dalam hal ini Bupati yang tertuang dalam RPJMD menjadi visi misi dari semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan yaitu *“MEWUJUDKAN KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI”*. Dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah, BPBD Kabupaten Nunukan melaksanakan Misi Kepala Daerah yang ke-4 yaitu *“Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata”*.

Dalam mewujudkan misi Kepala Daerah, BPBD Kabupaten Nunukan perlu menyusun Rencana Strategi dan Rencana Kerja tahunan yang berkaitan dengan program kebencanaan. Program kebencanaan disusun dengan memprioritaskan program dan kegiatan untuk pemenuhan pelayanan dasar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 8 bahwa *“BPBD atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar”*.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka BPBD Kabupaten Nunukan dipandang perlu untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029, sehingga sasaran Renstra yang telah dirumuskan dapat menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah selama 5 tahun.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Renstra BPBD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
  11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930 );
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 Nomor 19);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nunukan;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
37. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025–2029 adalah sebagai bagian dari tahapan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan tahun 2025–2029 adalah sebagai:

1. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD 2025–2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan;
2. Landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kabupaten Nunukan, penguatan peran aktif dari bidang kebencanaan dalam pelaksanaan perencanaan, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPBD Kabupaten Nunukan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penulisan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.3 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - 2.3.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - 2.4.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

**BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
  - 3.3.1 Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
  - 3.3.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2025-2029
- 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029
  - 3.4.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
  - 3.4.2 Matriks Penahapan Renstra PD

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD
  - 4.3.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
  - 4.3.2 Uraian Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - 4.4.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 4.4.2 Perangkat Daerah Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki kondisi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013 – 2033, potensi terjadinya jenis bencana alam yang mengancam Kabupaten Nunukan antara lain adalah tanah longsor, banjir, Kebakaran Hutan, kekeringan, angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Bencana non-alam yang mungkin terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan, sedangkan potensi bencana sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana non alam dan bencana sosial, baik frekuensi maupun kerawannya relatif kecil terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Salah satu dasar penguatan kebijakan dalam pelaksanaan kebencanaan termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 18 mengamanatkan agar daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah mengatur kebencanaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nunukan. Dengan terbentuknya beberapa kebijakan tersebut mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk menetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

###### a. Tugas Perangkat Daerah

BPBD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan

penanggulangan bencana. Bencana sebagaimana dimaksud adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf 1, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**b. Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan tugas BPBD juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh; dan
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

**c. Struktur Perangkat Daerah**

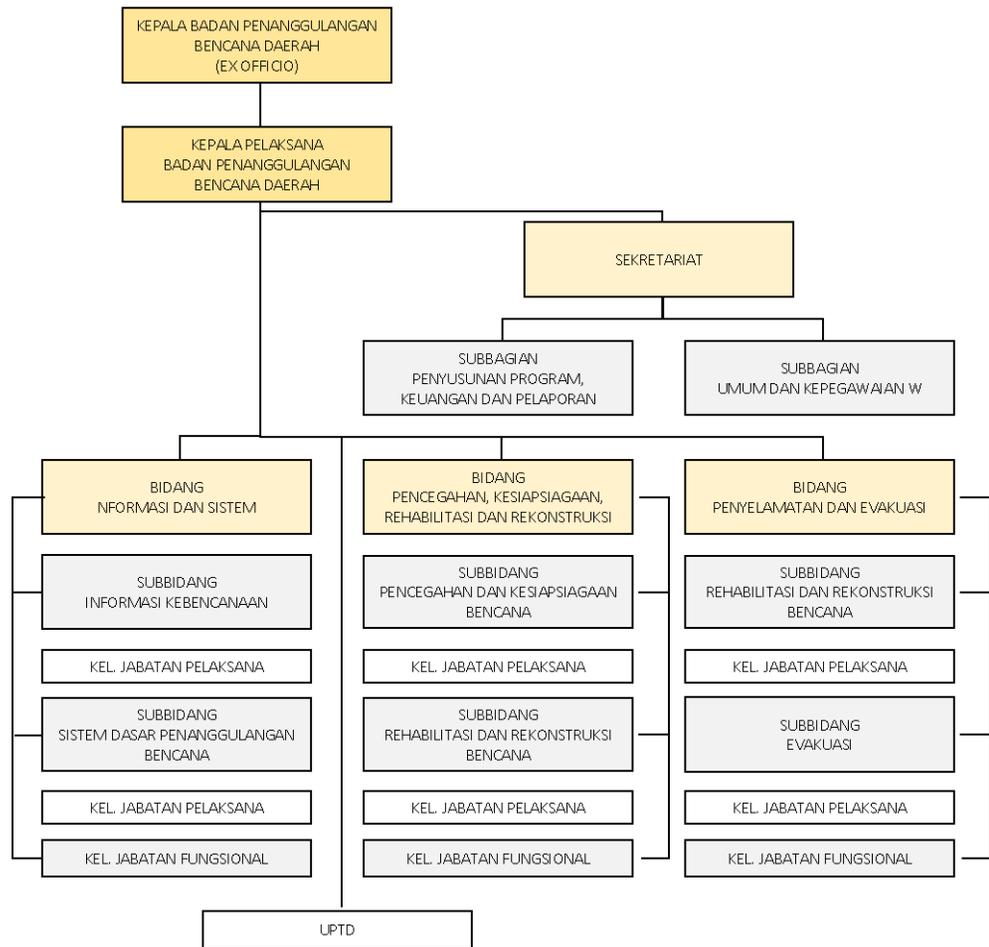
Susunan organisasi BPBD, terdiri dari :

1. Kepala Badan : secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. Kepala Pelaksana;
3. Sekretariat Badan, yang terdiri dari :

- a) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan; dan
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Informasi dan Sistem, yang terdiri dari :
    - a) Subbidang Informasi Kebencanaan; dan
    - b) Subbidang Sistem Penanggulangan Bencana.
  5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, yang terdiri dari:
    - a) Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana; dan
    - b) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana.
  6. Bidang Penyelamatan dan Evakuasi, yang terdiri dari :
    - a) Subbidang Penyelamatan; dan
    - b) Subbidang Evakuasi;
  7. UPTD;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  9. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dari uraian diatas dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan.

Gambar 2.1  
Struktur Organisasi



## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

#### 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Status

Sumber daya aparatur PNS, P3K dan Honorer berdasarkan kondisi terakhir per 01 Agustus 2025 berjumlah 84 orang, terdiri dari:

Eselon II : 1 Orang

Eselon III : 4 Orang

Eselon IV : 8 Orang

Pejabat fungsional : 3 Orang

Staf PNS : 20 Orang

Staf P3K : 6 Orang

Staf Honorer : 42 Orang

#### 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Sumber Daya Manusia yang berdasarkan Pangkat Golongan dengan rincian sebagai berikut:

- Gol IV/b : 2 Orang

- Gol IV/a : 3 Orang

- Gol III/d : 5 Orang

- Gol III/c : 4 Orang

- Gol III/b : 1 Orang
- Gol III/a : 11 Orang
- Gol II/d : 7 Orang
- Gol II/c : 1 Orang
- Gol II/b : 1 Orang
- Gol II/a : 1 Orang
- Gol IX : 2 Orang
- Gol V : 4 Orang

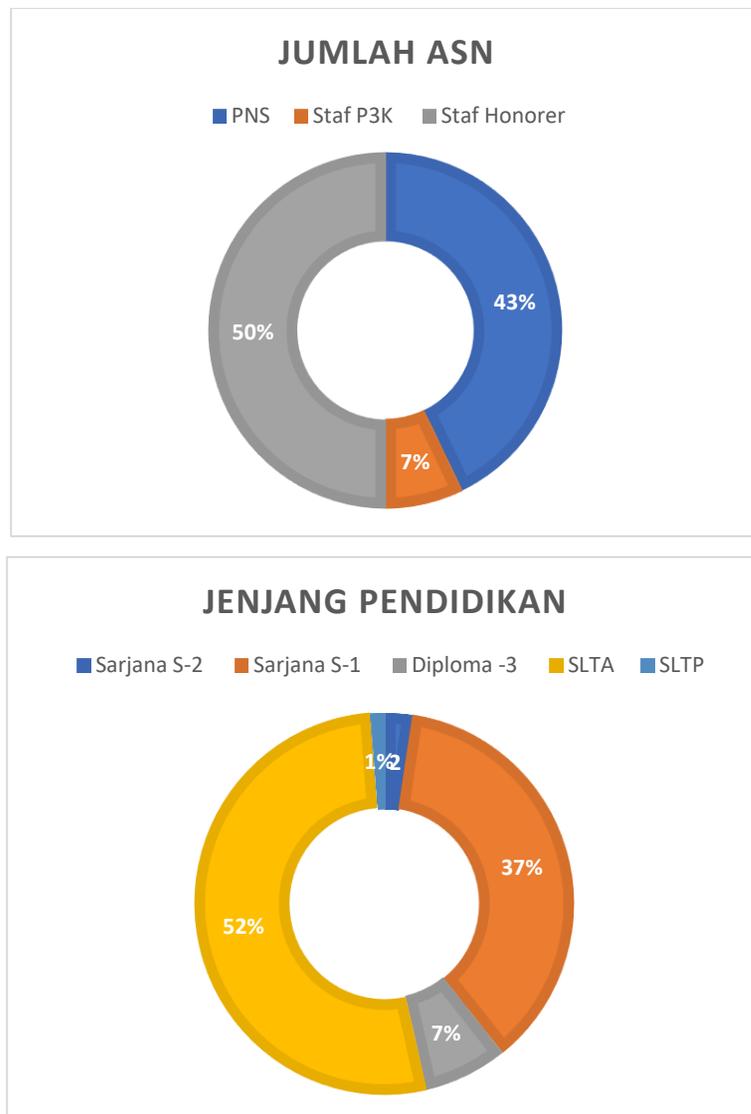
### 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Sumber Daya Manusia yang berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

- Sarjana S-2 : 2 Orang
- Sarjana S-1 : 31 Orang
- Diploma -3 : 6 Orang
- SMA : 44 Orang
- SLTP : 1 Orang

Gambar 2.2

Diagram Jumlah ASN



#### b. Asset/Modal

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Sumber Pembiayaan	Kondisi Barang
<b>I</b>	<b>Aset Bangunan Gedung</b>				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2012	Pembelian	Baik
2	Gedung Pos Jaga Permanen	1	2014	Pembelian	Baik
3	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	2023	Pembelian	Baik
<b>II</b>	<b>Aset Tanah</b>				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	2002	Pembelian	Baik
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	2013	Hibah	Baik
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	2015	Hibah	Baik
<b>III</b>	<b>Aset Kendaraan Dinas</b>				
1	Pick Up	2	2011	Hibah	Baik
2	Pick Up	1	2014	Pembelian	Rusak Berat
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1	2014	Pembelian	Baik
4	Mobil Pemadam Kebakaran	1	2024	Pembelian	Baik
5	Sepeda Motor	2	2011	Hibah	Rusak Ringan
6	Sepeda Motor	1	2012	Pembelian	Baik
7	Sepeda Motor	4	2014	Pembelian	Baik
8	Sepeda Motor	3	2020	Pembelian	Baik
9	Sepeda Motor	3	2023	Pembelian	Baik
10	Sepeda Motor	4	2024	Pembelian	Baik
11	Perahu Long Boot / Long Boat	1	2023	Pembelian	Baik
12	480 Armada Rescue	1	2017	Pembelian	Rusak Ringan
13	Perahu Karet	1	2014	Pembelian	Rusak Berat
14	Perahu Karet	1	2017	Hibah	Rusak Berat
15	Perahu kayu	2	2024	Pembelian	Baik
<b>IV</b>	<b>Peralatan Kantor</b>				
1	Lap Top	4	2012	Pembelian	Rusak Ringan
2	Lap Top	1	2013	Pembelian	Rusak Ringan
3	Lap Top	1	2018	Pembelian	Rusak Ringan
4	Lap Top	2	2019	Pembelian	Baik
5	Lap Top	2	2021	Pembelian	Baik
6	Lap Top	3	2022	Pembelian	Baik
7	Lap Top	5	2023	Pembelian	Baik
8	Lap Top	4	2024	Pembelian	Baik
9	A.C. Split	1	2012	Pembelian	Rusak Ringan
10	A.C. Split	4	2014	Pembelian	Rusak Ringan
11	A.C. Split	1	2016	Pembelian	Baik
12	A.C. Split	4	2024	Pembelian	Baik
13	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2012	Pembelian	Rusak Ringan
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2015	Pembelian	Rusak Ringan
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	2017	Pembelian	Rusak Ringan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Sumber Pembiayaan	Kondisi Barang
16	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	2020	Pembelian	Baik
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2022	Pembelian	Baik
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	2023	Pembelian	Baik
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	2024	Pembelian	Baik
20	Lemari Kayu	2	2012	Pembelian	Rusak Ringan
21	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	2013	Pembelian	Rusak Ringan
22	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2013	Pembelian	Rusak Ringan
23	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	2024	Pembelian	Baik
24	Lemari Es	1	2012	Pembelian	Baik
25	Meja 1/2 Biro	1	2010	Pembelian	Rusak Ringan
26	Meja 1/2 Biro	3	2011	Pembelian	Rusak Ringan
27	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	2012	Pembelian	Rusak Ringan
28	Meja 1/2 Biro	1	2013	Pembelian	Rusak Ringan
29	Meja Kerja Kayu	3	2014	Pembelian	Rusak Ringan
30	Meja 1/2 Biro	1	2014	Pembelian	Rusak Ringan
31	Meja Kerja	1	2014	Pembelian	Rusak Ringan
32	Meja Kerja Besi/Metal	12	2014	Pembelian	Baik
33	Kursi Putar	5	2010	Pembelian	Rusak Ringan
34	Kursi Putar	3	2012	Pembelian	Rusak Ringan
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2012	Pembelian	Rusak Ringan
36	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	2012	Pembelian	Rusak Ringan
37	Kursi Putar	4	2014	Pembelian	Rusak Ringan
38	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	2024	Pembelian	Baik
39	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	2024	Pembelian	Baik
40	Mesin Absensi	1	2018	Pembelian	Rusak Berat
41	LCD Projector/Infocus	1	2022	Pembelian	Baik
42	perkakas bengkel kayu lainnya (dst)	1	2024	Pembelian	Baik
43	Sound System	1	2023	Pembelian	Baik
44	Sound System	1	2024	Pembelian	Baik
45	Brandkas	1	2014	Pembelian	Baik
46	Camera Electronic	1	2014	Pembelian	Rusak Berat
47	Papan Pengumuman	4	2012	Pembelian	Baik
48	Dispenser	1	2012	Pembelian	Rusak Berat
49	Kipas Angin	4	2014	Pembelian	Rusak Berat
50	Hard Disk	1	2013	Pembelian	Rusak Berat
51	Sofa	2	2014	Pembelian	Baik
<b>IV</b>	<b>Alat Pemenuhan</b>				
	Kebutuhan Dasar				
1	Tenda Pleton	2	2011	Hibah	Rusak Ringan
2	Tenda Posko	1	2011	Hibah	Rusak Ringan
3	Tenda Regu	3	2011	Hibah	Rusak Ringan
4	Tenda Keluarga	5	2011	Hibah	Rusak Ringan
5	Tenda BNPB	8	2017	Hibah	Rusak Ringan
6	Water Treatment (Mesin Proses Apung)	1	2011	Hibah	Rusak Berat
<b>V</b>	<b>Alat Lainnya</b>				

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Pengadaan	Sumber Pembiayaan	Kondisi Barang
1	Backpack Pump (Pompa Punggung Besar)	8	2020	Pembelian	Rusak Ringan
2	Pompa Portable	1	2020	Pembelian	Rusak Ringan
3	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	10	2020	Pembelian	Rusak Ringan
4	Nozzlemeter Flowmeter	1	2020	Pembelian	Rusak Ringan
5	Masker	7	2020	Pembelian	Baik
6	baju pengaman lainnya (dst)	7	2020	Pembelian	Rusak Ringan
7	Helm Dalmas	8	2020	Pembelian	Baik
8	Tempat Tidur Besi	22	2020	Pembelian	Rusak Berat

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Nunukan telah melakukan berbagai upaya dalam pengurangan risiko bencana periode tahun 2021 - 2024 antara lain :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten:

- Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
- Tersusunnya Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana:

- Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten
- Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten
- Terlaksananya Penanganan Pascabencana Kabupaten
- Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten
- Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Tersusunnya Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten

- Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten
- Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten
- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten

Adapun capaian kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Nunukan berdasarkan tujuan dan sasaran target Renstra 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021-2024

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Target SDGS (√)	Target IKK/ IKU (√)	Target Indikator SPM/ NSPK/ LPPD (√)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Tercapainya kondisi aman, tertib dan tentram	INDEKS KETAHANAN DAERAH (Indikator Tujuan PD)	Nilai		√		0,39	0,42	0,40	0,42	0,43	0,20	0,20	0,20	0,48	0,56	51%	48%	50%	114 %	130 %
2	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	PERSENTASE INDEKS PRIORITAS BENCANA (Indikator Sasaran Strategi PD)	Persentase		√		42%	46%	47%	48%	50%	51%	42%	46%	60%	73%	121 %	91%	98%	125 %	147 %
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Upaya Pelayanan Umum Perkantoran Dalam Sub Urusan Bencana	Persentase				N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	67%	83%	100 %	100 %	N/A	67%	83%	100 %	100 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja	Persentase				N/A	0%	100 %	100 %	100 %	N/A	0%	100 %	100 %	100 %	N/A	0%	100 %	100 %	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0%	0%	100 %	100 %	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	0%	200 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	0%	200 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan	Persentase				N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan				0	12	14	14	14	0	12	14	14	14	0%	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase				N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Target SDGS (v)	Target IKK/ IKU (v)	Target Indikator SPM/ NSPK/ LPPD (v)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				0	2	5	5	5	0	0	2	5	5	0%	0%	40%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang Disediakan	Paket				0	12	12	12	12	0	12	12	0	12	0%	100%	100%	0%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				0	25	25	25	25	0	8	25	25	25	0%	32%	100%	100%	100%
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase</b>				<b>N/A</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	0%	200%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0%	0%	0%	0%	200%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				0	0	0	12	12	0	0	0	1	0	0%	0%	0%	8%	0%
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase</b>				<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan				0	12	12	12	12	0	12	12	12	12	0%	100%	100%	100%	100%
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Terpelihara</b>	<b>Persentase</b>				<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Target SDGS (v)	Target IKK/ IKU (v)	Target Indikator SPM/ NSPK/ LPPD (v)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit				0	18	18	18	18	0	15	18	18	18	0%	83%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				0	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0%	0%	100%	100%	100%
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Penggulungan Bencana (Indikator Program Penanggulangan Bencana)</b>	<b>Persentase</b>				<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Upaya Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>Persentase</b>				<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>	<i>Orang</i>			<i>√</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>190</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>317%</i>
	<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	<i>Dokumen</i>			<i>√</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<b>2</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Upaya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase</b>				<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis	Kegiatan				0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Target SDGS (v)	Target IKK/ IKU (v)	Target Indikator SPM/ NSPK/ LPPD (v)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani																			
	<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	Unit			√	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	<i>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>	Orang			√	0	0	40	40	50	0	0	0	0	50	0%	0%	0%	0%	100 %
	<i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	Keluarga				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	<i>Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota</i>	<i>Jumlah dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal</i>	Dokumen				0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0%	100 %	0%	0%	0%
	<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	Kawasan				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	Orang			√	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0%	0%	100 %	0%	0%
	<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	Dokumen			√	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Target SDGS (v)	Target IKK/ IKU (v)	Target Indikator SPM/ NSPK/ LPPD (v)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen				0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>Laporan</i>			v	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0%	0%	100 %	100 %	100 %
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen			v	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	0%	0%
	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	<i>Kawasan</i>			v	0	100	20	40	25	0	0	0	45	20	0%	0%	0%	113 %	80%
<b>3</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Upaya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase</b>				<b>N/A</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>N/A</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>N/A</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	<i>Dokumen</i>			v	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0%	0%	0%	0%	0%
	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	<i>Orang</i>			v	0	10	10	10	10	0	35	26	140	23	0%	350 %	260 %	1400 %	230 %
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang				0	10	10	10	10	0	7	7	8	191	0%	70%	70%	80%	1910 %

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SATUAN	Target SDGS (v)	Target IKK/ IKU (v)	Target Indikator SPM/ NSPK/ LPPD (v)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan			√	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	0%	0%	0%	0%	0%
4	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase</b>				N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A	0%	0%	100 %	100 %	N/A	0%	0%	100 %	100 %
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen				0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100 %	100 %
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen				0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100 %	100 %
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel 2.3

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2020-2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	4.061.768.107	4.673.155.296	5.632.577.203	7.811.048.568	-	3.889.288.984	4.456.736.877	5.403.840.389	7.512.556.308	-	0,96	0,95	0,96	0,96	5.584.907.872	5.329.973.270
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	8.009.800	46.099.520	89.233.480	-	-	7.586.396	39.917.719	86.426.192	-	-	0,95	0,87	0,97	35.311.633	32.500.792
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	8.009.800	46.099.520	59.835.380	-	-	7.586.396	39.917.719	57.584.658	-	-	0,95	0,87	0,96	35.311.633	32.500.792
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	11.586.740	-	-	-	-	11.556.809	-	-	-	-	1,00	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	17.811.360	-	-	-	-	17.284.725	-	-	-	-	0,97	-	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	3.066.032.540	3.393.463.467	3.935.281.117	4.757.450.697	-	2.989.521.791	3.251.236.121	3.769.080.153	4.620.466.120	-	0,98	0,96	0,96	0,97	4.028.731.759	3.880.260.797
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.066.032.540	3.393.463.467	3.935.281.117	4.757.450.697	-	2.989.521.791	3.251.236.121	3.769.080.153	4.620.466.120	-	0,98	0,96	0,96	0,97	4.028.731.759	3.880.260.797
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	111.768.000	152.148.200	261.842.229	500.893.289	-	74.307.760	148.593.163	252.032.008	493.085.440	-	0,66	0,98	0,96	0,98	304.961.235	290.231.118
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	7.700.000	7.700.000	55.634.760	170.173.350	-	-	7.492.500	52.724.000	167.767.593	-	-	0,97	0,95	0,99	77.836.036	73.497.197
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	20.243.100	20.235.500	57.137.829	87.967.389	-	19.939.700	19.651.010	56.482.655	87.368.938	-	0,99	0,97	0,99	0,99	55.113.572	54.500.867
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	4.795.500	4.792.700	5.425.640	15.554.550	-	3.894.160	4.790.363	-	15.524.749	-	0,81	1,00	-	1,00	8.590.962	1.596.787
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	79.029.400	119.420.000	143.644.000	227.198.000	-	50.473.900	116.659.290	142.825.353	222.424.160	-	0,64	0,98	0,99	0,98	163.420.666	160.636.267
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	-	198.000.000	1.116.659.020	-	-	-	197.980.809	1.116.383.160	-	-	-	1,00	1,00	-0	-0

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	1.035.482.500	-	-	-	-	1.035.206.640	-	-	-	-	1,00	-	-
Pengadaan Mebel	-	-	-	-	81.176.520	-	-	-	-	81.176.520	-	-	-	-	1,00	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	198.000.000	-	-	-	-	197.980.809	-	-	-	-	1,00	-	-0	-0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	<b>776.149.567</b>	<b>990.092.329</b>	<b>1.024.374.337</b>	<b>1.109.210.552</b>	-	<b>740.021.133</b>	<b>953.637.611</b>	<b>988.784.950</b>	<b>977.511.914</b>	-	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,88</b>	<b>1.041.225.737</b>	<b>973.311.490</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	55.183.767	89.992.800	78.310.000	85.569.600	-	49.908.383	62.150.767	71.228.930	78.606.318	-	0,90	0,69	0,91	0,92	84.624.132	70.662.004
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	720.965.800	900.099.529	946.064.337	1.023.640.952	-	690.112.750	891.486.844	917.556.020	898.905.596	-	0,96	0,99	0,97	0,88	956.601.605	902.649.486
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	<b>107.818.000</b>	<b>129.441.500</b>	<b>166.980.000</b>	<b>237.601.530</b>	-	<b>85.438.300</b>	<b>95.683.586</b>	<b>156.044.750</b>	<b>218.683.482</b>	-	<b>0,79</b>	<b>0,74</b>	<b>0,93</b>	<b>0,92</b>	<b>174.677.507</b>	<b>153.669.075</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	98.318.000	109.951.000	106.980.000	175.601.530	-	76.954.000	76.954.000	96.890.650	156.780.960	-	0,78	0,70	0,91	0,89	130.844.176	110.208.536
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	9.500.000	9.500.000	10.000.000	12.000.000	-	8.484.300	9.325.000	9.266.500	11.903.200	-	0,89	0,98	0,93	0,99	10.499.999	10.164.899
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	9.990.500	50.000.000	50.000.000	-	-	9.404.586	49.887.600	49.999.322	-	-	0,94	1,00	1,00	33.333.333	33.295.640
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	-	<b>1.298.979.200</b>	<b>1.194.823.543</b>	<b>1.317.270.346</b>	<b>2.575.919.715</b>	-	<b>797.041.700</b>	<b>696.119.865</b>	<b>1.184.646.916</b>	<b>2.447.603.650</b>	-	<b>0,61</b>	<b>0,58</b>	<b>0,90</b>	<b>0,95</b>	<b>1.210.131.195</b>	<b>1.042.422.530</b>
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	-	<b>49.600.000</b>	<b>119.130.100</b>	<b>54.469.680</b>	<b>71.458.040</b>	-	<b>46.879.500</b>	<b>110.037.325</b>	<b>51.513.850</b>	<b>62.093.053</b>	-	<b>0,95</b>	<b>0,92</b>	<b>0,95</b>	<b>0,87</b>	<b>41.975.906</b>	<b>37.868.967</b>
<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</i>	-	-	119.130.100	54.469.680	71.458.040	-	-	110.037.325	51.513.850	62.093.053	-	-	0,92	0,95	0,87	41.975.906	37.868.967

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	49.600.000	-	-	-	-	46.879.500	-	-	-	-	0,95	-	-	-	-0	-0
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	-	<b>1.073.294.000</b>	<b>884.919.443</b>	<b>975.928.096</b>	<b>1.605.002.215</b>	-	<b>611.366.000</b>	<b>400.845.530</b>	<b>858.800.093</b>	<b>1.521.977.669</b>	-	<b>0,57</b>	<b>0,45</b>	<b>0,88</b>	<b>0,95</b>	<b>820.755.142</b>	<b>665.078.847</b>
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	1.035.965.900	451.716.943	174.154.501	455.200.000	-	584.196.700	152.040.000	130.387.526	452.471.749	-	0,56	0,34	0,75	0,99	360.357.147	244.966.424
<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	-	-	-	-	12.689.600	-	-	-	-	11.313.500	-	-	-	-	0,89	-	-
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	29.581.200	-	-	-	-	19.502.300	-	-	-	-	0,66	-	-	-	-0	-0
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	-	91.873.900	-	-	-	-	91.603.900	-	-	-	-	1,00	-	-0	-0
<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	-	59.940.000	48.430.000	-	-	-	54.765.030	47.510.000	-	-	-	0,91	0,98	-	16.143.333	15.836.666
<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	-	373.262.500	195.651.380	463.156.240	-	-	194.040.500	154.634.857	406.078.990	-	-	0,52	0,79	0,88	219.602.539	186.904.615
<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	-	-	55.680.110	300.000.000	-	-	-	54.746.110	299.977.500	-	-	-	0,98	1,00	100.000.000	99.992.500
<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	7.746.900	-	410.138.205	373.956.375	-	7.667.000	-	379.917.700	352.135.930	-	0,99	-	0,93	0,94	124.652.124	117.378.643
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	-	<b>176.085.200</b>	<b>190.774.000</b>	<b>222.068.970</b>	<b>512.774.880</b>	-	<b>138.796.200</b>	<b>185.237.010</b>	<b>220.847.900</b>	<b>504.721.110</b>	-	<b>0,79</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>	<b>0,98</b>	<b>308.539.281</b>	<b>303.602.005</b>

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	45.840.000	60.540.000	59.999.000	288.322.880	-	44.667.500	56.770.000	59.260.000	280.638.000	-	0,97	0,94	0,99	0,97	136.287.292	132.222.666
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	130.245.200	130.234.000	162.069.970	224.452.000	-	94.128.700	128.467.010	161.587.900	224.083.110	-	0,72	0,99	1,00	1,00	172.251.989	171.379.339
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	-	-	-	<b>64.803.600</b>	<b>386.684.580</b>	-	-	-	<b>53.485.073</b>	<b>358.811.818</b>	-	-	-	<b>0,83</b>	<b>0,93</b>	<b>38.860.866</b>	<b>35.872.712</b>
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	24.704.560	48.952.600	-	-	-	21.590.073	48.899.719	-	-	-	0,87	1,00	16.317.533	16.299.906
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	40.099.040	67.630.000	-	-	-	31.895.000	58.718.420	-	-	-	0,80	0,87	22.543.333	19.572.806
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	84.942.980	-	-	-	-	76.954.136	-	-	-	-	0,91	-	-
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	-	185.159.000	-	-	-	-	174.239.543	-	-	-	-	0,94	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.360.747.307</b>	<b>5.867.978.839</b>	<b>6.949.847.549</b>	<b>10.386.968.283</b>	-	<b>4.686.330.684</b>	<b>5.152.856.742</b>	<b>6.588.487.305</b>	<b>9.960.159.958</b>	-	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,95</b>	<b>0,96</b>	<b>6.795.039.067</b>	<b>6.372.395.801</b>

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan Kebencanaan. Berikut adalah kelompok sasaran layanan yang menjadi target utama selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.4

Kelompok Sasaran Layanan Kebencanaan

No	Jenis Layanan Kegiatan	Kelompok Sasaran
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana dan Perangkat Daerah
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Aparatur dan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masyarakat yang menjadi korban dan terdampak bencana
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Masyarakat yang ada di Kawasan Rawan Bencana dan Lembaga sub urusan kebencanaan

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh BPBD Kabupaten Nunukan. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, BPBD dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Nunukan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Kabupaten

Nunukan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.5  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi Rawan bencana	Kurangnya pemahaman masyarakat di kawasan rawan bencana terhadap informasi dan edukasi kebencanaan
2	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Risiko Bencana Kabupaten	Belum maksimalnya sosialisasi dan edukasi di kawasan rawan bencana sesuai dengan kajian dokumen KRB	Kurangnya keingintahuan masyarakat tentang Risiko Bencana Kabupaten
3	Keterbatasan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum optimalnya penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Minimnya Peralatan Penyelamatan Diri yang didistribusikan ke Warga Negara di kawasan rawan bencana
4	Kurangnya pelaksanaan gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Belum optimal pelaksanaan simulasi Kesiapsiagaan terhadap bencana sesuai SOP	Belum optimalnya keterlibatan instansi lain dalam pelaksanaan simulasi gladi kesiapsiagaan bencana
5	Belum ada pelatihan keluarga ketangguhan bencana	Perlunya dilaksanakan Pelatihan keluarga tanggap bencana	Kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana
6	Kurangnya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	belum optimalnya penanganan kawasan rawan bencana yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana
7	Kurang optimalnya pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten	Belum optimalnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten untuk penanganan awal darurat bencana	Minimnya jumlah pelatihan yang melibatkan personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
8	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat	Belum ada dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Belum maksimalnya keterlibatan instansi/lembaga terkait dalam penanganan tanggap darurat
9	Belum optimalnya penyampaian informasi dalam penanganan bencana	Belum optimalnya pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan perlindungan terhadap bencana.	Kurangnya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya
10	RPJMD belum berbasis pengurangan bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) masih dalam tahap proses Sah dan Legal	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan RPJMD Kabupaten Nunukan masi dalam tahap proses Penyelarasan
11	Rendahnya SDM aparatur dan masyarakat tentang kebencanaan	Belum meratanya kegiatan pelatihan kebencanaan terhadap aparatur di wilayah rawan bencana	Belum meratanya kegiatan pelatihan kebencanaan terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana
12	Tingginya intesitas bencana yang mengakibatkan korban yang terdampak	Keterbatasan kapasitas personil dalam pelaksanaan respon cepat	Keterbatasan sarana dan prasarana di kecamatan yang merupakan wilayah rawan bencana
		Belum tersedianya peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar	Lokasi bencana yang sulit dijangkau dalam waktu cepat
		Belum optimalnya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.	Belum optimalnya keterlibatan dunia usaha dalam penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
13	Belum adanya standar dokumen Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Belum terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten	Belum tersusunnya Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten yang melibatkan instansi terkait

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
14	Minimnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten	Masih kurang kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan darurat bencana	Perlunya dukungan peningkatan kapasitas relawan dalam penanganan darurat bencana
15	Belum tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah yang lengkap dan memadai	Belum optimalnya penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten	Kurangnya referensi dalam penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten
16	Belum optimalnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kurangnya maksimalnya upaya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Masih banyaknya lembaga dan kemitraan yang belum memahami kewajiban dalam Penanggulangan Bencana
17	Belum Tersedianya Sistem Informasi Kebencanaan	Belum optimalnya penerapan pengelolaan dan pemanfaatan Data dan Informasi Kebencanaan	Masih kurangnya ketersediaan sumber data realtime dari instansi terkait
18	Belum maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Belum terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Masih banyaknya lembaga yang belum mendapatkan pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
19	Kurangnya Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Masih kurangnya kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana	Masih kurangnya aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi dari Instansi terkait
20	Kurangnya SDM Aparatur dalam penyusunan dokumen pasca bencana	Belum terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana	Masih kurangnya kemampuan teknis Aparatur lintas sektor dalam penyusunan dokumen pasca bencana
21	Kurangnya Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	Belum terlaksananya kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten	Belum terlaksananya kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten lintas sektor

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
22	Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota
23	Belum maksimalnya pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan pengumpulan data	Belum tersedianya data terpilah di lokasi daerah rawan bencana
24	Belum maksimalnya Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kelembagaan urusan kebencanaan
25	Belum tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Belum terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Belum tersedianya data dukung bahan penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
26	Belum tersedianya Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum maksimalnya kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan analisis permasalahan, BPBD menghadapi berbagai tantangan serius dalam upaya penanggulangan bencana, mulai dari aspek kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, hingga kesiapsiagaan operasional. Rendahnya kapasitas SDM, keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya sistem peringatan dini berbasis teknologi, serta lemahnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penanggulangan bencana di daerah ini.

Di sisi lain, tantangan eksternal seperti alih fungsi lahan, deforestasi, perubahan iklim global, serta keterbatasan integrasi isu kebencanaan dalam pembangunan lintas sektor memperbesar risiko kejadian bencana. Minimnya koordinasi antar sektor, lemahnya regulasi daerah yang tidak adaptif terhadap dinamika risiko baru, serta

rendahnya kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim semakin memperumit kondisi. Terbatasnya infrastruktur logistik dan jalur distribusi di wilayah perbatasan serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi memperlihatkan perlunya reformasi menyeluruh baik dari sisi perencanaan, penguatan kapasitas, inovasi teknologi, maupun pendekatan berbasis komunitas.

Melihat kompleksitas tantangan ini, BPBD perlu menyusun strategi komprehensif yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, pemanfaatan teknologi berbasis risiko, penyesuaian regulasi, serta pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke dalam seluruh rencana pembangunan daerah. Dengan demikian, daya tahan dan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana di masa depan dapat meningkat secara signifikan.

Tabel 2.6

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 4 “PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA”	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Dampak Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Nunukan	Penguatan kelembagaan (Tim Terpadu)	Belum sinerginya lembaga pendukung
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terakomodir dalam Kegiatan Informasi dan Kesiapsiagaan	Belum optimal kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana pendukung kegiatan
			Peningkatan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terakomodir dalam Kegiatan Penanganan Bencana	Belum optimal kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana pendukung kegiatan
			Peningkatan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Penjabaran Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terakomodir dalam Kegiatan Penanganan Pasca Bencana	Belum optimal kapasitas SDM aparatur dan sarana prasarana pendukung kegiatan

Tabel 2.7

## Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Perencanaan Pembangunan Daerah melalui RTRW dan RDTR yang terintegrasi dengan hasil kajian risiko bencana melalui Dokumen KRB Kabupaten Nunukan	Kabupaten Nunukan	terintegrasi hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Nunukan dalam RTRW dan RDTR secara terstruktur	Belum terintegrasi	Belum diselarasakan	Upaya Penyelarasan
Meningkatnya kapasitas pemerintah yang saling sinergi dalam perencanaan tata ruang yang berbasis risiko bencana	Kabupaten Nunukan	Pemerintah yang saling bersinergi dalam perencanaan tata ruang yang berbasis risiko bencana	Belum bersinergi	Ego Sektoral	Penguatan Kelembagaan
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman di daerah rawan bencana	Kabupaten Nunukan	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan permukiman di daerah rawan bencana yang lebih berasas pengurangan risiko bencana (PRB)	Belum Berasaskan Pengurangan Resiko Bencana	Kurangnya pengawasan	Adanya Peta wilayah Rawan Bencana
Perencanaan Pembangunan infrastruktur yang resilien atau berbasis pengurangan risiko bencana	Kabupaten Nunukan	Pelaksanaan pengembangan perencanaan infrastruktur yang resilien	Belum berbasis pengurangan Risiko Bencana	Tidak mempunyai master plan daerah	Upaya pengurangan resiko bencana

### 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi isu strategis ini disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan dinamika lingkungan global, nasional, dan regional yang memengaruhi upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 2.8  
Isu Strategis

No	Capaian Kinerja / Peluang / Tantangan	Isu Strategis
1	Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Nunukan yang berbasis pengurangan risiko bencana dan berketahanan sosial, budaya, dan ekologi.	<p>Tata Kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) belum terpadu, belum komprehensif, belum terintegrasi, belum terkoordinasi dan belum multistakeholder.</p> <p>Kompetensi dan keterampilan SDM Kebencanaan yang masih perlu ditingkatkan dengan penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, evakuasi dan penanganan bencana secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.</p> <p>Upaya penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimal.</p> <p>Sistem informasi kebencanaan dan sistem pemulihan pasca bencana yang belum komprehensif.</p> <p>Tata kelola pemanfaatan ruang dan pemukiman masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana/fasilitas publik belum berbasis pengurangan risiko bencana (PRB).</p>

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pengurangan risiko bencana di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kapasitas internal perangkat daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, maupun lemahnya koordinasi lintas sektor. Isu-isu seperti minimnya aparatur yang tersertifikasi, kurangnya edukasi kebencanaan, lemahnya integrasi kebijakan lintas sektor, hingga perencanaan pembangunan yang belum ramah lingkungan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam mendukung strategi mitigasi dan adaptasi bencana. Selain itu, ancaman dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin memperparah kerentanan daerah terhadap bencana.

Isu strategis yang muncul menggarisbawahi pentingnya penguatan kebijakan berbasis ekologi, peningkatan kualitas infrastruktur tahan bencana, serta perlunya kolaborasi multipihak yang lebih solid. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang terintegrasi dan ketimpangan peran antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam

membangun ketangguhan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan harus fokus pada integrasi lintas sektor, pelibatan masyarakat secara lebih luas, serta pengembangan sistem informasi dan perencanaan berbasis pengurangan risiko bencana berkelanjutan

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah, terukur, dan operasional untuk dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan untuk memberikan arah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan daerah.

Oleh karena itu, penyusunan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Nunukan mengacu pada Visi Bupati Kabupaten Nunukan, yaitu: *“Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri”* yang diturunkan dalam Misi ke-4 yaitu *“Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata”*. Dari Visi dan Misi tersebut menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan penanggulangan bencana yang tidak hanya responsif terhadap risiko bencana, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan.

#### 3.1.1 Uraian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis isu strategis maka tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

##### a. Tujuan

Tujuan jangka menengah BPBD Kabupaten Nunukan adalah Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana yang dapat dicapai melalui pemenuhan 7 prioritas:

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

##### b. Sasaran

Sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Nunukan adalah Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat (*Sub Urusan Kebencanaan*) yang dapat dicapai melalui pemenuhan 6 indikator:

1. Kelembagaan
2. Sumber Daya Aparatur
3. Kebijakan
4. Pendanaan
5. Teknis Operasional
6. Teknis Operasional

### 3.1.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Beserta Target Kinerja 2025-2029

Perencanaan strategi yang menguraikan tujuan utama, sasaran spesifik untuk mencapai tujuan tersebut, dan sasaran kinerja terukur yang digunakan untuk mencapai pencapaian sasaran dan tujuan secara keseluruhan. Matriks ini berfungsi untuk menyelaraskan upaya organisasi dan menyatukan kemajuan dalam mencapai visi dan misi, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

#### Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 4 “PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA”	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Dampak Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	N/A	51	52	53	54	55	56
		Meningkatkan Nilai Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai Sakip	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A

### 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

#### 3.2.1 Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BPBD. Selain itu arah kebijakan Renstra BPBD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. BPBD memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

#### Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi upaya pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana.	Tata Kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) belum terpadu, belum komprehensif, belum terintegrasi, belum terkoordinasi dan belum multistakeholder.	Meningkatnya upaya pengelolaan DAS berbasis pengurangan risiko bencana yang terukur dan terstruktur	Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Nunukan yang berbasis pengurangan risiko bencana dan berketahanan sosial, budaya, dan ekologi.	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Nunukan
Upaya penurunan wilayah yang terpapar bencana		Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana banjir dan banjir bandang dalam cakupan DAS.		
Meningkatnya kualitas SDM Kebencanaan Daerah	Kompetensi dan keterampilan SDM Kebencanaan yang masih perlu ditingkatkan dengan penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan, evakuasi dan penanganan bencana secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.	Meningkatkan ketangguhan SDM Kebencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.		

Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kurangnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.	Upaya penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana belum optimal.	Terwujudnya masyarakat yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.		
minimnya upaya penanganan kesiapsiagaan dan darurat bencana.		Menguatnya upaya penanganan kesiapsiagaan dan darurat bencana		
masyarakat yang kurang terfasilitasi sistem informasi kebencanaan.	Sistem informasi kebencanaan dan sistem pemulihan pasca bencana yang belum komprehensif.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kebencanaan.		
kurangnya upaya pemulihan pasca bencana yang komprehensif.		Menguatnya sistem pemulihan pasca bencana yang komprehensif.		
belum tercapainya pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana (PRB).	Tata kelola pemanfaatan ruang dan pemukiman masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana/fasilitas publik belum berbasis pengurangan risiko bencana (PRB).	Terkendalinya risiko bencana akibat perkembangan pembangunan daerah.		

### 3.2.2 Matriks Penahapan Renstra PD

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh BPBD. Berikut ini

adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.3  
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Pengelolaan Risiko Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Penyusunan Rencana Kontijensi
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Pelatihan	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Respon Cepat Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Pencegahan dan Mitigasi Bencana Respon Cepat Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				
Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana				
Bimbingan Teknis Pasca Bencana				

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi penanganan Pascabencana				
Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana
Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana
Penguatan Kelembagaan Bencana				
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)
Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

##### 4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan BPBD. Program dan kegiatan BPBD tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi BPBD.

Tabel 4.1

## Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.530		14.400		15.280		15.030		15.000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.770		8.910		8.990		9.070		9.190	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	100	8.770	100	8.910	100	8.990	100	9.070	100	9.190	BPBD
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					5.760		5.490		6.290		5.960		5.810	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	2.580	100	2.280	100	3.080	100	2.730	100	2.580	BPBD
Meningkatnya Penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	1.760	100	1.790	100	1.790	100	1.810	100	1.810	BPBD
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	1.420	100	1.420	100	1.420	100	1.420	100	1.420	BPBD
TOTAL KESELURUHAN					14.530		14.400		15.280		15.030		15.000	

Tabel 4.2

## Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan / Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 4 “PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA”</b>  <b>Meningkatnya Ketahanan Daerah</b>	<b>Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Dampak Bencana</b>	<b>Meningkatnya Nilai Sakip</b>	<b>Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencanaan</b>		<b>Indeks Ketahanan Daerah</b>		
					<b>Nilai Sakip</b>		
					<b>Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
					<b>Meningkatkan penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					<b>Meningkatkan penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah sampai dengan dinyatakan sah/legal</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					<b>Meningkatkan penyelesaian administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

			sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Meningkatkan jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel			
			Meningkatkan jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				<b>Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
			Meningkatkan jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				<b>Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						<b>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana</b>		
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	<b>Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	
						<b>Jumlah Laporan pelayanan informasi rawan bencana</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi</i>	<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</i>	<i>SPM/LPPD</i>			

				<i>dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun</i>		
				<i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
			<b>Meningkatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Jumlah Laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
				<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>	<i>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	<i>SPM</i>
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
				<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
				<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>

			<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
			<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
	<b>Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat</b>		<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	
		<b>Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
			<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>SPM/LPPD</i>
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	<i>SPM/LPPD</i>
	<b>Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana</b>		<b>Persentase Penanganan Pasca Bencana</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	
		<b>Meningkatkan Penataan Sistem</b>	<b>Jumlah Laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	

				<b>Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</i>	SPM
					<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	SPM
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	<i>Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota</i>	SPM
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan	

				dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
				Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya :

Tabel 4.3  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN											KET	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET		PAGU (000.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.730.619.351,48		13.120		12.870		13.520		13.260		13.060	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebagai Penunjang Sub Urusan Bencana	Persentase	N/A	100	7.680.532.798	100	8.780	100	8.780	100	8.780	100	8.780	100	8.780	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	N/A	5	123.639.960	5	220	5	220	5	220	5	220	5	220	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	62.608.860	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.325.000	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	11.014.100	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	1	17.122.000	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	1	20.570.000	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan</b>	<b>Unit</b>	<b>N/A</b>	<b>4</b>	<b>5.058.519.754</b>	<b>4</b>	<b>5.310</b>									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	42	5.051.689.454	42	5.300	42	5.300	42	5.300	42	5.300	42	5.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	1	6.830.300	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>Unit</b>	<b>N/A</b>	<b>4</b>	<b>550.151.283</b>	<b>4</b>	<b>840</b>									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10	350.112.497	5	420	5	420	5	420	5	420	5	420	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	6	104.505.086	6	170	6	170	6	170	6	170	6	170	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1	29.729.700	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	2	65.804.000	2	200	2	200	2	200	2	200	2	200	
4	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>N/A</b>	<b>4</b>	<b>339.019.255</b>	<b>4</b>	<b>550</b>									
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	4	199.744.500	4	200	4	200	4	200	4	200	4	200	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	5	139.274.531	5	150	5	150	5	150	5	150	5	150	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	224	1	200	1	200	1	200	1	200	1	200	
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang</b>	<b>Unit</b>	<b>N/A</b>	<b>4</b>	<b>1.335.837.056</b>	<b>4</b>	<b>1.350</b>									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	127.754.736	12	130	12	130	12	130	12	130	12	130	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.208.082.320	12	1.220	12	1.220	12	1.220	12	1.220	12	1.220	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	N/A	4	273.365.490	4	510	4	510	4	510	4	510	4	510	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	20	245.725.490	20	350	20	350	20	350	20	350	20	350	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	3	27.640.000	3	10	3	10	3	10	3	10	3	10	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100	100	6.974.037.703	100	1.980	100	1.730	100	2.380	100	2.120	100	1.920	
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	568.609.570	100	1.310	100	1.310	100	1.310	100	1.310	100	1.310	
		Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100	100	507.439.281	100	1.050	100	1.050	100	1.050	100	1.050	100	1.050	
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelayanan informasi rawan bencana	Laporan	N/A	1	46.223.653	1	160	1	160	1	560	1	160	1	160	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	190	40	46.223.653	120	160	120	160	120	160	120	160	120	160	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	1	400	0	-	0	-	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	N/A	1	6.927.814.050	1	1.820	1	1.570	1	1.820	1	1.960	1	1.760	
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1	159.780.980	1	180	1	180	1	180	1	180	1	180	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	0	37	6.291.823.000	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian	Orang	50	50	16.219.500	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN											KET		
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET		PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		<i>operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>																
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	30	-	30	80	30	80	30	80	30	80	30	80		
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	0	1	18.661.370	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60		
	<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana</i>	<i>Orang</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>31.625.000</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>20</i>	<i>120</i>	<i>10</i>	<i>60</i>	<i>10</i>	<i>60</i>		
	<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	<i>Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>	<i>1</i>	<i>350</i>		
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	-	1	250	0	-	1	250	0	-	1	250		
	<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>	<i>laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>229.394.030</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>300</i>		
	<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	<i>Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>-</i>		
	<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	<i>Kawasan</i>	<i>20</i>	<i>40</i>	<i>180.309.820</i>	<i>60</i>	<i>180</i>	<i>60</i>	<i>180</i>	<i>60</i>	<i>180</i>	<i>60</i>	<i>180</i>	<i>60</i>	<i>180</i>		
<b>3</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>1</b>	<b>568.609.570</b>	<b>1</b>	<b>1.310</b>	<b>1</b>	<b>1.310</b>	<b>1</b>	<b>1.310</b>	<b>1</b>	<b>1.310</b>	<b>1</b>	<b>1.310</b>		
	<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat</i>	<i>Dokumen</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>49.168.000</i>	<i>3</i>	<i>150</i>	<i>3</i>	<i>150</i>	<i>3</i>	<i>150</i>	<i>3</i>	<i>150</i>	<i>3</i>	<i>150</i>		
	<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana</i>	<i>Orang</i>	<i>23</i>	<i>10</i>	<i>185.145.000</i>	<i>20</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>		
	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	0	0	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150		

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	0	40	79.413.810	60	150	60	150	60	150	60	150	60	150	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	191	8	216.086.000	50	500	50	500	50	500	50	500	50	500	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	38.796.760	3	60	3	60	3	60	3	60	3	60	
<b>4</b>	<b>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>Laporan</b>	<b>N/A</b>	<b>1</b>	<b>507.439.281</b>	<b>1</b>	<b>1.050</b>									
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	9.162.000	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	17.380.000	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	0	1	-	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0	1	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparaturnya penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang	0	20	68.357.270	30	150	30	150	30	150	30	150	30	150	
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	0	15	38.231.310	20	75	20	75	20	75	20	75	20	75	
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	0	1	42.801.000	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi	Lembaga	1	1	94.767.697	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KET	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)	TARGET	PAGU (000.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal																
	<i>Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota</i>	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	<i>Laporan</i>	0	1	64.827.104	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100		
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	89.079.530	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150		
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	1	78.728.220	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100		
	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokuman	0	1	4.105.150	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15		

#### 4.1.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</i>	SPM/LPPD
			<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota</i>	SPM/LPPD
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	SPM/LPPD
			<i>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota</i>	SPM
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	SPM/LPPD
			<i>Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota</i>	SPM/LPPD
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	SPM/LPPD
			<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota</i>	SPM/LPPD
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SPM/LPPD
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
			<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</i>	SPM/LPPD
			<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	SPM/LPPD
			Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	
			<i>Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana</i>	SPM/LPPD
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	SPM
			Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			<i>Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota</i>	SPM
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	

## 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

### 4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sub urusan kebencanaan oleh BPBD diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja BPBD.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis BPBD dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama BPBD terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.5  
Indikator Kinerja Utama PD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	Sumber data BNPB
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	N/A	51	52	53	54	55	56	Sumber data BPBD
3	Nilai Sakip	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	Sumber data BPBD

#### 4.2.2 Perangkat Daerah Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, BPBD telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97

2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persentase	29	43	71	71	86	86	71
5	Persentase penanganan pra bencana	Persentase	75	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penanganan pasca bencana	Persentase	0	100	100	100	100	100	100

## BAB V

### PENUTUP

Perencanaan strategis yang disusun ini merupakan upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nunukan untuk ikut menentukan keberhasilan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kebencanaan. Keberhasilan dalam mencapai visi dan misi BPBD Kabupaten Nunukan akan banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen pembangunan antara lain arah kebijaksanaan, kualitas program, struktur dan manajemen pemeliharaan, partisipasi masyarakat, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana serta semangat penyelenggaraan pembangunan di daerah, semua komponen tersebut harus berkembang secara dinamis, kreatif dan profesional serta bersifat proaktif dalam tuntutan perkembangan zaman.

Pengintegrasian aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah keharusan. Hal ini sebagaimana yang diamanahkan dari berbagai aturan perundangan terkini, salah satunya adalah Permendagri 86 Tahun 2017, telah menempatkan beberapa dokumen antara lain dokumen Kementerian/Lembaga (BNPB 2020-2024), Renstra Provinsi, RTRW dan KLHS sebagai bagian yang menjadi pertimbangan wajib dalam proses perencanaan. Sinkronisasi dari semua bidang kebencanaan bersama unsur perangkat daerah lainnya dan masyarakat menjadi hal-hal utama dalam mencapai tujuan BPBD Kabupaten Nunukan.

Dengan tersusunnya Renstra BPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, semoga dokumen ini dapat dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi resiko bencana di Kabupaten Nunukan selama 5 tahun.

Nunukan, 9 September 2025

Kepala Pelaksana,



ARIEF BUDIMAN, S.Pt. M.Si  
NIP. 19721412 200112 1 003